



Rencana Strategis

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PROBOLINGGO

2015 – 2019

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PROBOLINGGO



Figure 1

Kata Pengantar

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015–2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden. Semua unit kerja, satuan kerja, pimpinan, dan staf BPS harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhaslilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS Tahun 2015- 2019.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2015–2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Tahun 2015–2019. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, 6 Maret 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota probolinggo



Ir. Muhamad Wahyudi

Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; (3) efektifitas di dalam melakukan

pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB 1 - PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB 2 – VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK	
2.1 Visi Badan Pusat Statistik	7
2.2 Misi Badan Pusat Statistik	8
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik	11
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik	13
2.5 Nilai Nilai Inti BPS	14
BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BPS	18
3.3 Kerangka Regulasi	27
3.4 Kerangka Kelembagaan	29
BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	31
4.2 Kerangka Pendanaan	34
BAB 5 – PENUTUP	
5.1 Penutup	36
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005 -2025	16
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019	7
Tabel 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan	11
Tabel 2-3 Indikator Tujuan dan Target BPS 2015-2019	13
Tabel 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS	13
Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi	18
Tabel 3-2 Program dan Kegiatan BPS	22
Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	31
Tabel 4-2 Matriks Pendanaan	35

DAFTAR SINGKATAN

BMN Barang Milik Negara
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPS Badan Pusat Statistik
BPS-QAF Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework
Cerdas Change and Reform for the Development of Statistics
DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP Indikator Kinerja Program
IKK Indikator Kinerja Kegiatan
JFU Jabatan Fungsional Umum
JFT Jabatan Fungsional Tertentu
K/L Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPAA Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Program PPIS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG's Sustainable Development Goals
SDM Sumber Daya Manusia
SE Sensus Ekonomi
SIMPEG Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA System National Account
SSN Sistem Statistik Nasional
Statcap Statistical Capacity Building
UNSTAT United Nations Statistics Division
WTP Wajar Tanpa Pengecualian

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting.

1.1. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMN lima tahun kedua 2009-2014. Pertumbuhan ekonomi kota Probolinggo mencapai 6,81 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 5,53 %. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 6.674,88 Milyard, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 10.988.967. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 73,73 pada tahun 2009 menjadi 75,94 pada tahun 2013

Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,85 % di tahun 2010, menjadi 4,52 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan. Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Kota Probolinggo pada periode berikutnya.

Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik. Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosialekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
3. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Ukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, survey Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS Kota Probolinggo memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah Pusat Layanan statistik BPS Kota Probolinggo untuk melayani permintaan data dari pengguna data yang datang ke Perpustakaan BPS Kota Probolinggo.
2. Sistem perpustakaan online (Digilib) Jumlah kunjungan perpustakaan online terus mengalami peningkatan, tahun 2014 tercatat kurang lebih 700 pengunjung ke website BPS kota Probolinggo.
3. Penyempurnaan dan Pengembangan Website BPS Kota Probolinggo.

Dalam mendukung terciptanya good governance and clean government dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut
2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
3. Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, yaitu:
 - a. Trophy Bandha Tadya Abiwada Utama.
 - b. Peringkat II Utilisasi BMN.
4. Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik dalam rangka Pelayanan Publik

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS Kota Probolinggo telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS Kota Probolinggo sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya National Statistics Offices (NSO) lain, BPS selalu berpedoman kepada Fundamental Principles of Official Statistics, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (international cooperations) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan sistem official statistics di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik social dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik dari negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Potensi BPS Kota Probolinggo dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Rencana penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications ini menjadikan penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS Kota Probolinggo dari mana pun. Perkembangan global yang semakin terhubung dan permintaan keterbukaan data serta transparansi yang semakin tinggi mendorong setiap NSO untuk berkolaborasi secara bilateral maupun multilateral. Bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tanggal 31 Desember 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi yang mengakibatkan aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja berlangsung dengan tanpa hambatan. Konsekuensi dari diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Dalam upaya peningkatan daya

saing perekonomian nasional dibutuhkan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistic negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tersedianya keterbandingan data statistic (statistical data benchmarking) menunjang Pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang lebih baik. Peningkatan kebutuhan akan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik negara-negara berkembang lain, serta negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20, mendorong BPS untuk dapat membangun kemitraan strategis dengan NSO/kantor statistik dari negara-negara tersebut.

Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015, berdampak pada peningkatan kebutuhan data statistik yang terpercaya dalam merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada bagian lain, Indonesia juga menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukkan pada rancangan teknokratis RPJMN 2015-2019 pada lingkungan strategis sisi global yaitu adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Penyusunan Agenda Pasca 2015 dilakukan melalui rangkaian OWG, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20₁ tahun 2012 yang menghasilkan kesepakatan prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDG untuk masuk dalam Agenda Pasca 2015.

SDG's menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat menentukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistic Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, 2014, tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS Kota Probolinggo harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indicator SDG's tersebut.

1.2.2. Permasalahan

BPS Kota Probolinggo telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2015 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kota Probolinggo harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Kota Probolinggo dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kota Probolinggo merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kota Probolinggo dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Adanya kebutuhan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah, Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kemampuan SDM di BPS Kota Probolinggo saat ini masih belum semua pegawai memiliki kemampuan yang diharapkan.

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

2.1 Visi Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

2.2 Misi Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

2.1 Visi BPS Kota Probolinggo

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS Kota Probolinggo berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019:

**“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”
 (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)**

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

2.2 Misi BPS Kota Probolinggo

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

Visi BPS 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	MISI BPS 2015-2019
		1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter .

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistic

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ...

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... pembinaan dan koordinasi ... “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a). Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b). Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c). Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d). Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e). Pengembangan sistem informasi statistik;
- f). Peningkatan penyebaran informasi statistik;
- g). Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h). Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk

Membangun insan statistik ...

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

... yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berintegritas ... “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan BPS Kota Probolinggo

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan Tujuan BPS Kota Probolinggo untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Probolinggo dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019

		MISI BPS 2015-2019
Visi BPS 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
TUJUAN 2019	1. Peningkatan kualitas data statistik 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	

Adapun tujuan BPS Kota Probolinggo dalam rangka mencapai Visi BPS Kota Probolinggo dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:
 - 1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
 - 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
 - 2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:
 - 3.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 3.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
4. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
 - 4.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan.

Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS Kota Probolinggo. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2-3 Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kota Probolinggo

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	100%	100%
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	95%	95%	95%	95%	95%
3	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	10	10	10	10	10
4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	60	60	65	65

2.4 Sasaran Strategis BPS Kota Probolinggo

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
	SS2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik", adalah:

- 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dengan indikator sasaran:
 - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
 - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
 - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
 - 1.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
 - 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu
 - 1.1.6. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik", adalah:
 - 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS
 - 2.1.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
 - 2.1.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik", adalah:
 - 3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN dengan indikator sasaran:
 - 3.1.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", adalah:
 - 4.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dengan indikator sasaran:
 - 4.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
 - 4.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS dengan indikator sasaran:
 - 4.2.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
 - 4.2.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah:

- Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional, Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
 - b. Efektif memberikan hasil maksimal,
 - c. Efisien mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
 - d. Inovatif selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
 - e. Sistemik, meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.
2. Integritas, Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Dedikasi, memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
 - b. Disiplin, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
 - c. Konsisten, selarasnya kata dengan perbuatan,
 - d. Terbuka, menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
 - e. Akuntabel, bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.
3. Amanah, Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Terpercaya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
 - b. Jujur, melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
 - c. Tulus, melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
 - d. Adil, menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan BPS Kota Probolinggo

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

RPJM 1 (2005-2009)	RPJM 2 (2010-2014)	RPJM 3 (2015-2019)	RPJM 4 (2020-2025)
Menata kembali NKRI , membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik	Memantapkan penataan kembali NKRI Meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian	Mamantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek	Mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 2 Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:
 1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
 2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
 3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
 4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
 5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
 6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
 7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data

ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.

8. Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
9. Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi Indonesia, dan lain sebagainya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Probolinggo

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karenadinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Tabel.3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik	S.S.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			nasional dan internasional
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan Customer Relationship Management, 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
		2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai, memenuhi sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.
		3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel	1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
		4. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		nasional	statistik
T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	S.S.3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1. Meningkatkan kemudahan akses bagi instansi lain dalam memberikan metadata kepada BPS Kota Probolinggo
			2. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik pada instansi lain
		2. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait kegiatan statistik	1. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait kegiatan statistik
			2. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS Kota Probolinggo
T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	S.S.4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif; 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik, audit dan TI; 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.
	S.S.5. Meningkatnya kualitas sarana dan	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan	1. Mengoptimalkan pengawasan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	prasarana BPS	sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 2. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja	anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran; 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
		3. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

3.2.1 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 2 (dua) program generik yaitu: Program DMPTTL, Program PSPA. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana

anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Program Teknis BPS Kota Probolinggo adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Sedangkan untuk Program Generik, Satuan Kerja BPS Kota Probolinggo disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi. Prioritas kegiatan BPS Kota Probolinggo dilaksanakan dengan didasarkan kepada:

- a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional. Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Adapun hubungan antar program BPS Kota Probolinggo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah sebagai berikut.

Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA) Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel. 3-2 Program 1 dan Kegiatan BPS Kota Probolinggo

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas; 2.Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; 3.Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kesejahteraan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Tanaman Pangan,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					Hortikultura, dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Peternakan, Perikanan dan Kehutanan • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Distribusi • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Harga • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Produksi • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Pengeluaran • Pengembangan dan Analisis Statistik
		2.Peningkatan <i>response rate</i>	1.Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kesejahteraan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan • Penyediaan dan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					Pengembangan Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
					<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Distribusi • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Harga • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Produksi • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Pengeluaran • Pengembangan dan Analisis Statistik
			2.Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS	Program DMPTTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1.Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik 2.Meningkatkan <i>customer relationship management</i>	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik
			3.Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik	Program DMPTTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
		2.Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi	1.Meningkatkan kualitas <i>website</i> BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		statistik BPS	yang memadai 2.Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi		Informasi Statistik • Pengembangan Sistem Informasi Statistik
		3.Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	1.Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik; 2.Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.	Program PSPA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi
		4.Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	1.Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS.3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1.Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1.Meningkatkan kemudahan akses bagi instansi lain dalam memberikan metadata kepada BPS 2.Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di instansi lain	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, • Penyediaan Stat. Kesejahteraan Rakyat • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Tanaman Pangan,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					Hortikultura, dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan • Penyediaan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi • Penyediaan Statistik Distribusi • Penyediaan Statistik Harga, • Penyediaan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan Statistik Neraca Pengeluaran
T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1.Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi	1.Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif	Program DMPTTL	
			2.Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM		
			3.Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru		
	SS.5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	1.Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas	1.Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		kinerja 2. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja	penggunaan anggaran 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		
		3. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel	Program DMPTTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan

3.3 Kerangka Regulasi

Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaraan statistik sebagai amanat UU. BPS memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data

karena regulasi yang kurang kuat. Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok:

- (1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS
 - a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.
 - b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
 - c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
 - d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
 - e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
 - f. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
 - g. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
 - h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
 - i. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
 - j. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
 - k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS
- (2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik. Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.
 - a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Intisari dari regulasi:
 - Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
 - Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.
 - b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Intisari dari regulasi:
 - Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus,
 - Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
 - Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
 - Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.
 - c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah Intisari dari regulasi:
 - Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang perlu

mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997, Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.
2. Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1997, Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Di sisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut. Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dengan instansi lain, yakni: Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi; Keppres No. 86 tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS, namun peran dari stakeholder lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit.

Dari uraian di atas, penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BPS dalam amandemen UU statistik adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan,
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundangundangan,
3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik
4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis
5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis
6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru
7. Melakukan uji publik terhadap RUU Statistik
8. Penyempurnaan terhadap RUU Statistik
9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pesatnya perkembangan teknologi, tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang relevan dan up to date, serta meningkatnya permintaan keterbandingan data secara internasional, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu, serta mengacu standar nasional dan internasional, melalui

proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM), serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selama kurun waktu 2015-2018, BPS akan melakukan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics (Statcap-CERDAS). Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pencapaian visi BPS. Pertama, kualitas data harus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Hal ini memerlukan adanya keterpaduan statistik (statistical integration) dan dijalankannya Statistical Quality Assurance Framework secara konsisten. Kedua, perlunya membangun arsitektur TIK yang mendukung tercapainya visi BPS melalui: manajemen data yang mendukung keterpaduan statistik, datawarehouse sebagai enabler keterpaduan statistik, perbaikan infrastruktur jaringan yang memudahkan pertukaran data antar kantor statistik daerah di seluruh Indonesia, perbaikan dalam hal keamanan data untuk menjamin kerahasiaan termasuk pada saat pertukaran data.

Ketiga, perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penataan sistem manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kepada kompetensi. Hal ini mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi karyawan, manajemen kinerja, manajemen karir hingga penggajian. Selain dari penataan sistem, BPS telah mencanangkan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman bagi karyawan untuk menjalankan perannya secara efektif, yaitu: Profesional, Integritas dan Amanah atau disingkat PIA. Budaya kerja ini harus dijalankan secara konsisten oleh setiap insan BPS sehingga agenda reformasi BPS berjalan seperti yang diharapkan.

Keempat, perlunya pengelolaan kelembagaan untuk mendukung lancarnya program STATCAP-CERDAS mencapai BPS masa depan. Pengelolaan kelembagaan mencakup semua aspek mulai dari perencanaan strategis, Tata Kelola Yang Baik (Good Public Governance), peran Inspektorat, analisis beban kerja, sistem pengelolaan dokumen (Document Management System - DMS), sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System - DSS), kerangka aturan hukum yang berlaku, dan penetapan budaya kerja yang diinginkan.

3.4.1 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan mengakomodir perubahan dinamika baik internal maupun eksternal melalui penguatan kelembagaan. Beberapa pertimbangan dalam penguatan kelembagaan di antaranya adalah: saat ini struktur organisasi BPS gemuk, tidak efektif, dan efisien, adanya rencana pengembangan proses bisnis dan produk statistik, jadwal kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang kegiatan statistik. Tujuan penguatan kelembagaan yang akan dilakukan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses bisnis mengacu pada SBFA dan EA;
2. Penguatan UU Statistik No 16 tahun 1997 dan rancangan aturan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan
3. Meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola statistik nasional. Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan lingkungan kerja ke depan, yaitu:

1. Desain Organisasi

Pada tahapan awal akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS saat ini. Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian terhadap kerangka tatakelola institusi dan tatakelola struktur organisasi. Hasil evaluasi menjadi landasan pengembangan Model Organisasi yang berdasarkan SBFA dan EA untuk menentukan Kerangka Struktur Organisasi BPS.

2. Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS di masa depan yang merubah dari silo oriented menjadi functional oriented menyebabkan BPS harus melakukan penyesuaian organisasi. Perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif dan efisien bila disertai penguatan hukum dan perundang-undangan yang memayungi perubahan ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:
 - a. Melakukan Amendemen UU No. 16 Tahun 1997;
 - b. Menyusun berbagai regulasi statistik untuk mendukung aktivitas bisnis BPS di masa depan;
 - c. Merancang regulasi penguatan organisasi dalam SSN (*); dan
 - d. Merancang mekanisme komunikasi yang efektif tentang hukum dan regulasi statistik kepada stakeholder dan responden BPS.

3.4.2. Kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan pembangunan system dan aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka pengembangan sumberdaya manusia (SDM) BPS juga menjadi target Program Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM BPS saat ini adalah:

1. Kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung manajemen SDM yang kuat di BPS Kota Probolinggo;
2. Terbatasnya sarana dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen SDM;
3. Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian Internal BPS Pusat dan Daerah);
4. Belum terintegrasinya fungsi strategis manajemen SDM antara BPS Pusat dan daerah
5. Adanya gap kompetensi antara SDM Pusat dan daerah. Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam aktivitas Statcap CERDAS, adalah:
 1. Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (driver) transformasi;
 2. Membangun kebijakan dan prosedur kepegawaian yang terintegrasi dengan proses bisnis BPS;
 3. Penguatan struktur organisasi SDM dalam pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik; dan
 4. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM).

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPS Kota Probolinggo

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	97%
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	70%
		IKSS 1.3. Persentase	100 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		pemutakhiran data MFD dan MBS	
		IKSS 1.4. Jumlah publikasi/ laporan yang terbit tepat waktu	31
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1
		IKSS 1.6. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	99,6 %
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil Kegiatan statistik	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)	IKSS 2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	800
		IKSS 2.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	50 %
		IKSS 2.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90 %
T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS.3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	IKSS 3.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	10
T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	IKSS 4.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	65
	SS.5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	IKSS 5.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap	100 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		pemenuhan sarana dan prasarana BPS	
		IKSS 5.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100 %

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
 - b. Pelayanan Diseminasi Informasi Statistik,
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Statistik,
 - d. Penyediaan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
 - e. Penyediaan Statistik Kesejahteraan Rakyat,
 - f. Penyediaan Statistik Ketahanan Sosial,
 - g. Penyediaan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,
 - h. Penyediaan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,
 - i. Penyediaan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,
 - j. Penyediaan Statistik Distribusi,
 - k. Penyediaan Statistik Harga,
 - l. Penyediaan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata,
 - m. Penyediaan Statistik Neraca Produksi,
 - n. Penyediaan Statistik Neraca Pengeluaran,
 - o. Analisis Statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS adalah sebagai berikut.

Tabel. 4-2 Matriks Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi					
	Statistik Sosial	1.149.595	243.122	249.364		
	Statistik Produksi	105.939	96.850	91.614		
	Statistik Distribusi	150.454	3.215.573	913.454		
	Statistik Neraca	75.828	43.837	45.604		
	Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik	200.730	56.865	70.739		
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM PPIS	1.682.546	3.656.247	1.370.775		
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran					
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.012.948	2.010.769	2.063.916		
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	369.737	421.671	525.962		
	Penyusunan Renstra BPS 2015-2019	3.608	-	-		
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM DMPTTL	2.386.293	2.432.440	2.589.878		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS					
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	215.680	397.000	65.810		
	Renovasi Gedung dan Bangunan	131.100	112.400	144.365		
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM PSPA	346.700	509.400	210.175		

BAB 5

Bab 5 Penutup

Renstra BPS periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS tahun 2015 - 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2015 – 2019, yakni: 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; 3. Peningkatan koordinasi kegiatan statistik dalam rangka penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang bersinambung; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam Renstra BPS 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program Statistical Capacity Building-Chance and Reform for Development of Statistics in Indonesia (Statcap CERDAS). Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2

Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 - Kerangka Regulasi

Lampiran 1

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna Terhadap kualitas data BPS												1. Subbagian Tata Usaha 2. Seksi Statistik Sosial 3. Seksi Statistik Produksi 4. Seksi Statistik Distribusi 5. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 6. Seksi IPDS
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	91%	91%	100 %	100 %	100 %							
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistic BPS sebagai rujukan utama	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %							
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	1.4. Jumlah Aktivitas statistic yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-							
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	15	15	15	15	15							
	1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	12	12	12	12	12							
	1.7. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	-	1	-	-	-							
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user Engagement)												
	2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses	6000	7000	8000	8000	8000							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	data dan informasi statistik melalui website BPS												
	2.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %							
	2.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %							
	SS.3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN												
	3.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	10	10	10	10	10							
	SS.4. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel												
	4.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	50	60	65	65							
	SS.5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BPS												
	5.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	5.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)													
	Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survey BPS Provinsi												1. Subbagian Tata Usaha
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100	100							2. Seksi Statistik Sosial
	Jumlah dokumen updating peta	82											3. Seksi Statistik Produksi
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik	0	2	2	2	2							4. Seksi Statistik Distribusi
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu	0	2	2	2	2							5. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei kebutuhan data	100	100	100	100	100							6. Seksi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	(response rate) survei Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan Pendekatan rumah tangga Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk	100	100	100	100	100						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus	100										
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	-	-	-	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	100	100						
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial	100	-	-	-	-						
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	0	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	0	-	-	-	-						
	Persentase Pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	0	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	0	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Dengan pendekatan usaha Persentase Pemasukan dokumen (response rate) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	-										
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	0	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	0	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan	-	-	-	-	-						
	Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase Pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	2	14	14	14	14						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	2	14	14	14	14						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	99	99	99	99	99						
	Persentase Pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016	100	100	100	100	100						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016	95	100	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga	13										
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	13										
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	0										
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga	100										
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	95										
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup	-										
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei biaya hidup											
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	(2017=100)											
	Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate)											
	survei neraca produksi dengan pendekatan usaha Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang	1										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	terbit tepat waktu												
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Memilik ISSN/ISBN	0											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	100											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	100											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100											
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan Pengembangan statistik	12											
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	12											
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	11											
	Persentase pemasukan Dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	100											
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)													1. Subbagian Tata Usaha
	Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12							
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	12	12	12	12	12							
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100	100	100	100	100							
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik	95	95	95	95	95							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	95	95	95	95	95						
PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												1. Subbagian Tata Usaha
	Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS											
	Meningkatnya pengguna layanan yang puas Terhadap sarana dan prasarana BPS											
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	97	97	97	97	97						
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100	100	100	100	100						